



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN  
**SUB UNIT KERJA** : SEKOLAH PASCASARJANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDARMAWAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 79650

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87.5 m<sup>2</sup>/50 m<sup>2</sup> di BANDUNG, LAINNYA Rp. 720.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 736.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOBIL, HONDA BR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 146.750.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 244.250.000
4. MOTOR, HONDA CBR 150 RAB 1 Tahun 2018, LAINNYA Rp. 65.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 78.420.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 736.468.851**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.520.888.851

**III. HUTANG** Rp. 561.659.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.959.229.851

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.